

KONFLIK INTERNAL SURIAH DAN UPAYA PENYELESAIAN DAMAI

Harmiyati

har3yati@yahoo.com

Prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN ‘Veteran’ Yogyakarta
Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta

Abstract

Middle east area is one of the most trouble area in the world. The interest of superpowers are dominant in this area. Thus, if there are any conflicts in this area, either internal or external conflicts, the cases will become escalated as the superpowers intervention. Syrian conflict is the example of the case study in this paper. By understanding the background of conflict, we are able to know the role of states in the area and outer area, and the attainment of finishing the conflict.

Key words: Middle east, Syria, conflict, superpower, interest.

Pendahuluan

Revolusi tingkat akar rumput yang melanda dunia Arab atau lebih dikenal sebagai revolusi *Arab Spring* atau *Jasmine Revolution* sejak awal tahun 2011 telah memaksa para pemimpin otoriter dan berkuasa terlalu lama di kawasan itu untuk meletakkan jabatan. Mereka itu adalah Zine El Abidin Ben Ali dari Tunisia, Hosni Mubarak dari Mesir, Muammar Khadafi dari Libya, dan Ali Abdullah Saleh dari Yaman. Keberhasilan revolusi di Tunisia dan Mesir telah menginspirasi para aktivis gerakan reformasi di Suriah untuk melakukan hal yang sama, yaitu menjatuhkan pemerintahan Presiden Bashar Al Assad yang berkuasa sejak tahun 2000. Namun, upaya menggulingkan Bashar bukannya berhasil, malah telah menyeret negara superpower AS dan Rusia untuk melakukan intervensi atas konflik internal Suriah yang telah berlangsung selama dua setengah tahun tersebut. Besarnya kepentingan negara-negara besar semakin mempersulit solusi untuk mengakhiri konflik, kendati pada akhirnya upaya diplomasi Rusia berhasil menyelamatkan Suriah dari ancaman invasi AS dan sekutunya.

Latar Belakang Konflik

Gelombang protes massal di Suriah dimulai sejak 15 Maret 2011 di kota Daraa, Suriah Selatan, yang dipicu oleh kekurangan pasokan air di kota tersebut. Namun, tanggapan kurang aspiratif pemerintah lokal dan pusat, serta kegagalan mengatasi persoalan di Daraa telah berkembang menjadi aksi protes menentang Pemerintah Presiden Bashar Al Assad. Aksi protes kemudian menyebar ke kota-kota lain:

Aleppo, Damaskus, Latakia, Homs, Hama, dan Banias. Aksi-aksi demonstrasi justru dijawab oleh pemerintah melalui kekerasan militer, aksi pun berubah menjadi keinginan pergantian rezim dan berakhirnya kekuasaan Partai Baath sejak tahun 1963. Mereka menuntut diadakannya amandemen konstitusi, pencabutan Undang-Undang Darurat Militer yang berlaku sejak tahun 1963, kebebasan pers, pembebasan tahanan politik untuk mereka yang terlibat dalam aksi unjuk rasa menentang presiden, dan tuntutan mundurnya Bashar al Assad dari kursi kepresidenan (<http://www.republika.co.id>).

Tuntutan kaum reformis tersebut direspon positif oleh Pemerintah Bashar al Assad melalui penyelenggaraan referendum tentang amandemen konstitusi dan reformasi politik. Pelaksanaan referendum yang diselenggarakan pada 26 Februari 2012 menghasilkan 157 pasal, yang dalam draf konstitusi baru ditegaskan bahwa peran Partai Baath sebagai penguasa tunggal dihapus, digantikan oleh sistem multi partai. Dalam UU baru Suriah ditegaskan pula bahwa setengah anggota parlemen harus dari wakil para buruh dan petani. Berdasarkan pasal 88 UUD tersebut Presiden Suriah hanya memiliki kesempatan menjabat selama dua periode, dengan setiap periode jabatan adalah tujuh tahun. Pasal tersebut akan berlaku sejak pemilu kepresidenan pada tahun 2014 mendatang (<http://indonesian.tribe.ir>).

Pengesahan referendum ditolak oleh kaum demonstran yang tetap bersikukuh pada tuntutan mereka agar Presiden Bashar al Assad

mundur dari tampuk kekuasaan. Tuntutan pihak reformis tersebut ditolak oleh Pemerintah Assad yang tetap berusaha mengutamakan jalur dialog untuk mengatasi persoalan politik Suriah. Namun, kaum reformis tetap pada pendiriannya, bahkan dunia internasional, dalam hal ini AS dan Turki, tetap mengkritik Pemerintah Assad agar menghentikan kekerasannya terhadap para demonstran. Kelompok reformis kemudian menyatakan membentuk kelompok oposisi dan mendapat dukungan penuh pihak Barat melalui Pemerintah Turki.

Keterlibatan Turki

Dukungan Turki sebagai garda depan perlawanan dan campurtangan Barat terhadap urusan internal Suriah dibuktikan dengan pendirian sejumlah kamp pengungsi di kota perbatasan Antokia, Turki, yang menampung lebih dari 11.000 orang pengungsi Suriah. Di kota itu pula pemerintah pusat Ankara membuka pintu kamp-kamp pengungsinya untuk para tentara yang memisahkan diri dari pemerintah Suriah, dan membentuk Tentara Pembebasan Suriah (*FSA= Freedom Syrian Army*).serta menjadikan kota tersebut sebagai markas aslinya. Pemerintah Turki juga menjadi tuan rumah pertemuan pertama kelompok oposisi Suriah di kota Anatolia. Selain itu, Pemerintah Turki

juga memfasilitasi pertemuan kelompok oposisi Suriah di kota Istanbul pada 18 Maret 2013 untuk membentuk pemerintah sementara dengan 12 calon untuk jabatan perdana menteri. Dari ke-12 kandidat tersebut mayoritas teknokrat yang berbasis di pengasingan, dan hanya dua nominasi yang berasal dari wilayah Suriah. (<http://www.wartanews.com>).

Secara militer, Pemerintah Turki juga berperan menyelundupkan kelompok-kelompok bersenjata yang bertujuan mengacaukan situasi Suriah, dari wilayah Propinsi Idlib di sepanjang perbatasan Turki-Suriah. Mereka disuplai senjata dari perbatasan laut dan darat Turki. Selain itu, Pemerintah Turki juga berusaha melakukan tindakan provokatif dengan melakukan latihan militer di selatan propinsi Hatay, dekat perbatasan Suriah (*lihat peta*). Latihan yang bertujuan menguji system mobilisasi tentara dan komunikasi antara lembaga publik dan angkatan bersenjata jika terjadi perang telah melibatkan 40 kendaraan militer dan 730 personel yang berpartisipasi dalam latihan perang yang diberi sandi *Yildirim* (Petir) 2011 (<http://indonesian.irb.ir>). Turki juga mengirim helikopter militer dalam rangka pengintaian di wilayah perbatasan, meskipun manuver Turki tersebut telah menuai akibatnya dengan ditembak jatuhnya jet tempur F-4 Phantom oleh pihak militer Suriah karena



dianggap melanggar zona udara Suriah.

Langkah-langkah militer Turki terhadap Suriah merupakan realisasi dari usulan AS yang meminta Turki untuk terlibat secara militer di perbatasan Suriah. Berdasarkan usulan tersebut, militer Turki akan diturunkan di kawasan yang sedang bergolak. Melalui campurtangan terbatas, militer Turki akan masuk ke sebagian wilayah Suriah, sehingga tercipta kawasan yang terpisah dari pemerintah pusat Damaskus, seperti yang terjadi di Benghazi, Libya. Pada tahap berikutnya, wilayah tersebut akan dijadikan pangkalan perlawanan bersenjata melawan Pemerintah Suriah. Dalam usulan AS tersebut, ketika rencana itu dilaksanakan, maka militer Turki akan mendapat dukungan dari media massa Arab dan Barat, yang akan membantu propaganda gerakan maju militer Turki, sehingga gelombang penentangan rakyat Suriah dapat tersebar ke seluruh wilayah, dan akhirnya rezim Suriah akan terguling. Sebagai imbalannya, AS dan Perancis akan berupaya mempercepat proses masuknya Turki dalam keanggotaan Uni Eropa. (<http://indoneian.irib.ir>).

Langkah-langkah Turki dan Barat untuk mengacaukan situasi Suriah mendapat respon tegas dari Pemerintah Bashar Al Assad, yang berusaha menumpas aksi-aksi kekerasan bersenjata kelompok teroris yang didukung Barat. Sejak muncul aksi demonstrasi Maret 2011 hingga September 2013 jumlah korban tewas mencapai 132.000 orang, dan memaksa 2 juta warga Suriah meninggalkan tanah airnya. (<http://www.wartanews.com>)

Sebenarnya, tidak mudah bagi Turki untuk merealisasikan kemauan AS dan Barat di Suriah. Secara internal, mayoritas rakyat Turki menginginkan Pemerintah Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan untuk mengambil sikap yang lebih netral terkait konflik Suriah. Sebuah jajak pendapat oleh *Ankara Social Research Center* menunjukkan bahwa lebih dari dua pertiga rakyat Turki menentang intervensi di Suriah, meskipun ada insiden penembakan pesawat militer Turki di atas perairan Suriah. (<http://Indonesian.irib.ir>). Kenyataan ini semakin sulit digunakan oleh Pemerintah Erdogan untuk memprovokasi dan memanipulasi publik untuk mendukung perang.

Sementara secara eksternal, langkah-langkah Turki untuk memainkan peran destruktif

di Suriah juga tidak mudah dilaksanakan secara penuh. Usulan Turki tentang *no-fly zone* untuk Suriah dan upaya menciptakan kota Aleppo seperti Benghazi ditolak oleh NATO. Upaya Turki dengan memanfaatkan isu tertembaknya pesawat Turki di perairan Suriah pada 22 Juni 2012, dan tembakan mortir ke wilayahnya ternyata tidak cukup menarik dukungan negara-negara Barat. Hal ini karena kenyataan bahwa Pemerintah Presiden Bashar Al Assad tidak mudah digulingkan, karena bersama dengan rakyat Suriah rezim ini masih bersatu, sedang kelompok oposisi tidak bisa diandalkan dan lemah untuk mengcounter kekuatan Pemerintah Bashar disebabkan oleh kondisi mereka yang terpecah-pecah. Sekitar 100.000 orang militan yang didukung asing terpecah menjadi 1000 kelompok, sebanyak 10.000 militan berjuang untuk kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, seperti Front Al-Nusra, sedang sisanya berjuang untuk kelompok-kelompok militan yang berbeda. Bukti menunjukkan bahwa sejumlah besar (95%) pejuang Suriah didatangkan dari luar negeri (terutama dari Eropa: Austria, Spanyol, Swedia, Jerman, Belgia, Belanda, Irlandia, Perancis, dan Inggris), dan hanya 5% yang berasal dari wilayah Suriah. (<http://www.republika.co.id>). Tercatat lebih dari 15.000 orang warga asing berada di garis depan perlawanan terhadap rezim Bashar al Assad.

Keterlibatan AS

Keterlibatan AS dalam instabilitas politik Suriah, didasarkan pada dua alasan: *pertama*, adanya kebijakan AS yang ingin terus memperkokoh Israel, terutama dalam menghadapi musuh besar dan terdekatnya, Suriah. Komitmen AS untuk tetap memperkuat Israel secara ekonomi, politik, dan militer tidak diragukan lagi sejak negeri zionis tersebut berdiri pada 14 Mei 1948. Secara politik dan militer, keberadaan Israel yang kuat sangat dibutuhkan oleh Pemerintah AS dalam rangka mengamankan pasokan energi minyak dari Timur Tengah, terutama dari kawasan Teluk Persia sebagai pemasok utama. Israel dibutuhkan sebagai elemen penakut terhadap kekuatan-kekuatan dunia Timur Tengah yang tidak akomodatif terhadap kepentingan AS di kawasan. Untuk itu, AS berusaha memperkuat Israel melalui dukungan persenjataan, dana, dan teknologi militer sampai ke tingkat yang

sophisticated. Kepemilikan Israel atas pesawat-pesawat tempur F-16 buatan AS, pengembangan rudal *Arrow*, pembangunan sistem perisai rudal *Iron Dome*, hingga penguatan proyek nuklir di reaktor Dimona, Gurun Negev (Israel Selatan), merupakan bukti betapa AS sangat mendukung Israel secara militer. Secara ekonomi, komitmen AS terhadap Israel dibuktikan melalui bantuan-bantuan ekonomi AS yang langgeng sejak 1948. Data terakhir (2012) membuktikan bahwa total bantuan AS ke Israel telah mencapai lebih dari 115 milyar dollar AS, dengan lebih dari 67 milyar dolar untuk bantuan militer (<http://www.eraislam.com>). Pemerintah Washington juga tidak pernah mengurangi bantuan tahunan sebesar 3 milyar dolar AS, meskipun AS mengalami resesi terburuk dalam beberapa dasawarsa yang telah mendorong Pemerintah AS untuk memberlakukan pemotongan besar pada sebagian besar program pelayanan public bagi warga negaranya.

Suriah, sejak awal Israel berdiri adalah salah satu Negara Arab yang konsisten mendukung perjuangan bangsa Arab Palestina. Hal ini dibuktikan melalui dukungan Pemerintah Damaskus terhadap lahirnya faksi-faksi perjuangan Palestina seperti organisasi gerilyawan *Al Sa'iqah*, PFLP (*Popular Front Liberation of Palestine*) pimpinan George Habash, PFLP-GC (*Popular Front Liberation of Palestine-General Command*) di bawah Ahmad Jibril, dan faksi Hamas yang kesemuanya gerakan tersebut berbasis di ibukota Damaskus. (Riza Sihbudi, 1991:120). Secara sosial-ekonomi, Assad adalah "bapak" bagi jutaan pengungsi Palestina (dan juga Irak). Sejak tahun 1948, Suriah adalah tempat berlindung bagi orang-orang Palestina yang terusir dari tanah air mereka. Kondisi 500.000 pengungsi Palestina di Suriah jauh lebih baik daripada di Lebanon atau Yordania. Para pengungsi ini mendapat layanan kesehatan dan perumahan yang sama sebagaimana rakyat Suriah (<http://Indonesian.tribune.ir>).

Di mata Israel, Suriah adalah batu sandungan bagi perluasan hegemoni Israel dan juga AS di Timur Tengah, karena sikapnya yang anti-zionisme dan anti-imperialisme AS di kawasan. Kecenderungan sikap Suriah yang anti-Israel ini terbukti dari keterlibatannya dalam Perang Arab-Israel tahun 1948, 1967, dan tahun 1973. (M.A. Rais, 1989: 199-233). Dalam perang Arab-Israel tahun 1973 atau disebut sebagai

Perang Yom Kippur, Suriah harus menerima kenyataan pahit karena kehilangan wilayah Dataran Tinggi Golan yang direbut oleh Israel dan diduduki hingga sekarang. Ditambah dengan kenyataan bahwa Mesir sebagai negara pengobar perang melawan Israel justru menandatangani perjanjian damai Camp David secara sepihak bersama Israel, membuat Suriah tampil sebagai pemimpin kelompok Arab yang menentang perdamaian dengan Israel. Bentuk penentangan ini ditunjukkan melalui pembentukan *The Steadfastness Group of States*, yang terdiri dari Aljazair, Libya, Yaman selatan, PLO, Irak, dan Suriah. Sejak Mesir berdamai dengan Israel, Suriah telah menjadi negara terdepan dalam menghadapi Israel. Untuk itu, sejak tahun 1980 Presiden Hafez Al Assad melakukan kerjasama militer dengan Uni Soviet, dan menandatangani *Treaty of Friendship and Cooperation*. (Bantarto Bandoro, 1991:11). Aliansi strategis Suriah-Uni Soviet ini terus berlangsung hingga kepemimpinan putra Hafez, Bashar Al Assad, saat ini dalam rangka mengurangi superioritas mutlak Israel atas Suriah. Kerjasama militer Suriah-Uni Soviet yang kini berubah menjadi Suriah-Rusia ini dibuktikan dengan masih adanya pangkalan Angkatan Laut Rusia di Pelabuhan Tartous, Suriah.

Alasan ke dua keterlibatan AS di Suriah adalah ketidaksenangan AS dan Israel atas dominasi Suriah-Iran-Hizbullah di kawasan Timur Tengah yang telah mencemaskan eksistensi Israel. Sikap anti-AS dan anti-Israel dari ketiga kekuatan tersebut telah menjadi kekuatan poros di Timur Tengah dalam melawan ancaman Israel. Suriah telah menjadi sekutu Iran dalam mendukung milisi Hizbullah di Lebanon Selatan melawan Israel, itulah sebabnya dalam konflik internal Suriah pemerintah Iran dan kelompok Hizbullah mendukung pemerintah Bashar Al Assad dalam memerangi kelompok pemberontak.

Keterlibatan AS di Suriah tidak hanya didukung oleh Pemerintah Turki, melainkan juga oleh sekutu-sekutunya yang lain di kawasan Timur Tengah, terutama Yordania, Lebanon, Arab Saudi, dan Qatar. Kedua Negara yang terakhir ini telah mengeluarkan dana masing-masing 5 milyar dolar AS untuk membayari kelompok pemberontak yang didatangkan dari luar Suriah. Disamping itu, Arab Saudi juga mendukung fasilitas persenjataan kelompok pemberontak

yang didatangkan dari Kroasia. Laporan surat kabar Kroasia, Jutarnji List, menyatakan bahwa 3.000 ton senjata dibayar oleh Arab Saudi atas permintaan AS, dan dikirim ke pemberontak Suriah melalui Yordania sejak Nopember 2012 (<http://www.wartanews.com>).

AS sejak awal munculnya konflik Suriah juga berusaha membujuk negara-negara besar anggota Dewan Keamanan PBB untuk menghukum Suriah, tetapi usaha AS untuk merealisasikan sanksi DK PBB tersebut terganjal oleh penolakan Rusia dan Cina yang menginginkan negara-negara di dunia untuk melihat persoalan Suriah secara obyektif dan lebih berimbang. Upaya AS untuk menjatuhkan Pemerintah Bashar Al Assad juga ditunjukkan melalui pelatihan-pelatihan militer oleh agen CIA terhadap kelompok pemberontak di wilayah perbatasan Yordania-Suriah, sementara sekutu utama Baratnya: Inggris, Perancis, dan Israel juga memasok persenjataan untuk kaum pemberontak.

Upaya AS mempercepat destabilisasi Suriah akhirnya ditunjukkan melalui tuduhan penggunaan senjata kimia oleh tentara Suriah sejak Maret 2013. Tuduhan ini diulanginya ketika terjadi peristiwa pembunuhan warga sipil di desa pinggiran ibukota Damaskus pada tanggal 21 Agustus 2013 yang menewaskan 1.400 orang. AS pun mulai meningkatkan tekanan terhadap Pemerintah Suriah untuk segera menyerangnya, hal ini ditunjukkan melalui pengiriman kapal induk dan 5 kapal perang AS yang merapat di perairan Laut Mediteran (L.Tengah). Meskipun demikian, upaya AS untuk menyerang Suriah tidak mendapat restu Kongres AS dan mayoritas rakyat AS yang tidak melihat urgensi perang di Suriah, apalagi trauma perang Afghanistan dan perang Irak masih membekas di kalangan masyarakat AS.

Penolakan Rusia dan Upaya Penyelesaian

Manuver AS yang terus-menerus terhadap Suriah telah mendapat respon negatif, terutama dari pihak Rusia sebagai sekutu strategis Suriah di kawasan Timur Tengah. Sejak awal krisis, Rusia bersama Cina telah tiga kali menggagalkan upaya AS untuk mengeluarkan Resolusi DK PBB terkait Suriah. Presiden Rusia, Vladimir Putin, memperingatkan AS bahwa serangan terhadap Suriah bisa menghasilkan lebih banyak korban

tidak bersalah dan menimbulkan gelombang terorisme di seluruh dunia. Sejak tahun 2001, Rusia menyaksikan AS dan sekutunya ikut campur dalam urusan Timur Tengah, mengatur serangan militer, dan mengorganisir atau memicu serangan, Dimulai dari Afghanistan, Irak, dan yang terakhir di Libya, AS memimpin invasi dengan berbagai dalih, baik ada restu DK PBB maupun tidak. Dampak dari campurtangan AS ini adalah terciptanya ketidakstabilan politik di ketiga Negara tersebut hingga kini. Oleh karena itu, Putin mengemukakan tentang pentingnya dialog dalam upaya menyelesaikan persoalan Suriah. Menurut Putin, penyelesaian krisis Suriah harus ditempuh melalui beberapa tahap secara urut, yaitu penghentian kekerasan, dimulainya perundingan, mencari solusi dan menetapkan kerangka konstitusi untuk masa depan Suriah, dan yang terakhir dilakukan reformasi mendasar. (<http://indonesian.tribune.com>). Bagi Putin, segala bentuk solusi yang ditawarkan namun tidak melalui tahap-tahap tersebut maka akan menimbulkan kekacauan di Suriah.

Prakarsa Putin tersebut diusulkan ketika Barat dan sekutu Timur Tengahnya terus memaksakan ambisi mereka untuk melakukan intervensi militer di Suriah. Pemerintah Rusia memahami bahwa jika terjadi intervensi militer dan Pemerintah Bashar terguling, maka Rusia tidak akan dapat melanjutkan hubungannya dengan Suriah, dan kondisi ini tidak hanya akan merugikan ekonomi Rusia, tetapi dari segi militer Pemerintah Moskow juga akan mengalami kerugian besar karena kehilangan pangkalan militernya di Tartous dan pasar senjata di Suriah. Berdasarkan laporan lembaga riset SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), impor senjata Suriah selama lebih dari lima tahun belakangan meningkat 600 persen. (<http://indonesian.tribune.com>). Rusia menjadi penjamin 78 persen dari persenjataan Suriah, berton-ton senjata dan suku cadangnya telah dikirim ke Suriah, dan jumlahnya semakin meningkat sejak pemberontakan meletus. Tahun 2012, Rusia dan Suriah berhasil mencapai kesepakatan untuk mensuplai Suriah dengan 130 pesawat tempur type Yak-130 dengan nilai kontrak 550 juta dolar AS dan kontrak bisnis peralatan militer lainnya senilai 700 juta dolar AS.

Sambil mengutamakan upaya diplomasi, Pemerintah Rusia menunjukkan dukungan penuh

secara militer kepada Pemerintah Suriah. Hal ini ditunjukkan melalui pengiriman rudal jelajah anti-kapal yang mampu menjangkau seluruh garis pantai Suriah dari kemungkinan serangan dari laut. Pada Desember 2011, Rusia mengerahkan kapal perusak anti-kapal selam Admiral Tributs bersama-sama dengan konvoi 9 kapal perangnya dari Armada Laut Hitam, Armada Baltik, dan Armada Utara Rusia yang dipimpin oleh kapal induk Admiral Kuznetsov ke perairan Suriah untuk memblokir setiap serangan yang dipimpin oleh aliansi militer Barat terhadap Suriah dengan dalih intervensi kemanusiaan. (<http://indonesian.trib.ir>).

Variasi upaya diplomasi dan tekanan psikologis-militer Rusia terhadap pihak Barat membawa hasil dengan disepakatinya proposal untuk menghancurkan senjata kimia Suriah setelah pertemuan selama tiga hari antara Menlu AS, John Kerry, dan Menlu Rusia, Sergei Lavrov. Berdasarkan proposal tersebut, Suriah harus mengajukan daftar pasokan senjata kimia dalam satu pekan. Proposal juga mengatur kinerja pengawas senjata PBB di Suriah sebelum Nopember 2013, yang tujuannya untuk menghancurkan seluruh pasokan senjata kimia Suriah hingga pertengahan tahun 2014. Kerry dan Lavrov sepakat jika Suriah melanggar proposal tersebut, maka Pemerintah Bashar akan menghadapi konsekuensi pasal 7 piagam PBB, yaitu intervensi militer.

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, terlihat jelas bahwa krisis politik di suriah telah semakin berkepanjangan akibat adanya kepentingan geopolitik superpower yang saling berlawanan. Berbeda dengan yang terjadi di Libya, Pemerintah Presiden Bashar Al Assad ini tidak mudah dijatuhkan karena secara eksternal didukung penuh oleh Rusia. Diplomasi Rusia berhasil menekan AS dan sekutunya untuk mendudukkan persoalan Suriah ke meja perundingan. Usulan penyelesaian konflik internal Suriah melalui upaya penghancuran senjata kimia Suriah paling tidak telah mengamankan posisi Israel dari resiko ancaman Suriah. Dengan melucuti Suriah, jika AS dan sekutunya memutuskan untuk melakukan serangan secara cepat ke Suriah, maka negara tersebut sudah tidak memiliki senjata kimia untuk mempertahankan diri, sehingga akan mudah

untuk menundukkan Suriah. Di lain pihak, usulan penyelesaian konflik Suriah telah menunjukkan kemenangan diplomasi Rusia atas AS. Dampak yang diperoleh dari kemenangan Rusia ini adalah meningkatnya peran Rusia di Timur Tengah dan naiknya kredibilitas internasional Rusia. Jika Rusia berhasil mencegah perang di Timur Tengah dan mencegah rezim boneka Barat berkuasa di Suriah, maka ini akan menjadi kemenangan Pemerintah pusat Moskow untuk pertama kalinya di wilayah Timur Tengah.

Referensi:

- Bandoro, Bantarto, *Timur Tengah pasca Perang Teluk: Dimensi Internal dan Eksternal*, CSIS, Jakarta, 1991.
- Rais, M. Amien, *Timur Tengah*, Jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989.
- Sihbudi, Riza, *Bara Timur Tengah*, Mizan, Bandung, 1991.
- “Ambisi Turki Mengobar Perang di Suriah”, http://indonesian.trib.ir?fokus=-/asset_publisher/v5Xe/content/ambisi-turki-mengobar-perang-di-suriah, diakses 28-6-2012.
- “AS tak Lihat Peran Iran dalam Akhiri Kekerasan di Suriah”, dalam <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/07/12/m709bs-as-tak-lihat-peran-iran-dalam-akhiri-kekerasan-di-suriah>, diakses 12-7-2012.
- “Bantuan AS ke Israel telah Mencapai 115 Miliar Dolar”, dalam <http://www.erasmuslim.com>, diakses 25-11-2013.
- “Demi Uni Eropa, Turki Obok-Obok Suriah”, dalam <http://indonesian.trib.ir>, diakses 8-10-2011.
- “Kelompok Oposisi Suriah Bentuk Pemerintahan Baru di Istanbul”, dalam <http://www.wartanews.com/timurtengah/065d2a10-Oc6d-24f4-b843-5fea36048539/kelompok-oposisi-suriah-bentuk-pemerintahan-baru-di-istanbul>, diakses 18-3-2013.
- “Kelompok Pemberontak Suriah Meminta Bantuan Senjata ke AS”, dalam <http://www.wartanews.com/timurtengah/ae447ec-3803-3/a/-eeeb-71f359600dae/kelompok-pemberontak-suriah-meminta-bantuan-senjata-ke-as>, diakses 13-4-

2013.

“Meski Gagal, Musuh-Musuh Suriah Tingkatkan Tekanan”, diakses dari http://indonesian.tribe.ir/fokus/-/asset_publisher/v5Xe/content/meski-gagal-musuh-musuh-suriah-tingkatkan-tekanan, diakses 27-2-2012.

“Perdamaian Suriah Dijadwalkan Pertengahan Desember”, dalam <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/11/18/mwgn4h-perdamaian-suriah-dijadwalkan-pertengahan-desember>, diakses 25-11-2013.

“Ribuan Warga Eropa Terlibat Perang Suriah”, dalam <http://www.republika.co.id>, diakses 4-4-2013.

“Soal Suriah, Rusia Tetap Tidak Bergeming Menghadapi Barat”, dalam <http://indonesian.tribe.ir>, diakses 21-3-2012.

“Suriah, Ajang Perang Rusia dan Barat”, dalam <http://indonesian.tribe.ir>, diakses 3-12-2011.

“Turki Mulai Latihan Dekat Perbatasan Suriah”, dalam <http://indonesian.tribe.ir>, diakses 7-10-2011.